

Jateng Pos, 13 April 2020

Tahun Ini, Tolak Naikan Banpol

BATANG - Pemkab Batang menyatakan tidak dapat menaikkan besaran nominal bantuan keuangan pada Parpol seperti yang diusulkan oleh Fraksi di DPRD Batang. Sebab, besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Parpol di Kabupaten Batang sudah melebihi besaran yang ditetapkan dalam PP Nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada Parpol. "Untuk tahun berjalan ini, alokasi anggarannya masih sama sebagaimana tahun yang lalu," ujar Bupati Batang H Wihaji, Kemarin.


Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Parpol telah diatur secara detail dengan format baku sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, serta penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik. "Laporan bantuan keuangan oleh Parpol wajib ber-

pedoman pada Permendagri menjamin tertib administrasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Wihaji.

Sementara itu, Bupati juga akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negeri (ASN) untuk menggenapi anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) penanggulangan covid-19 yang mencapai Rp 40 M. "Dari TPP ASN yang dipotong ditarget sebesar Rp 5,3 M. Pemotongan 1 bulan TPP ASN, merupakan bentuk kebersamaan untuk Jaring Pengaman Sosial," kata H Wihaji

Bupati juga mengesefisiensi anggaran perjalanan dinas, kegiatan pelatihan, diklat dan beberapa proyek fisik. Memang, selama ada pembatasan berkerumun,

sosial distancing dan stay at home untuk memutus penularan Corona berdampak pula pada penurunan PAD. "Usaha pariwisata, hiburan, restoran akan mengalami penurunan pajaknya. Maka harus ada perubahan anggaran yang radikal," tukas H Wihaji. (edo/dik)



Laporan bantuan keuangan oleh Parpol wajib berpedoman pada Permendagri menjamin tertib administrasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

H. WIHAJI
Bupati Batang